

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
MENINGKATKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT UNTUK
MENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAGA STABILITAS
POLITIK DI KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Yudhi Kristian

NPP. 29.1106

Asdaf Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Selatan

Program Studi Kebijakan Publik

Fakultas Politik Pemerintahan

Email: kristianyadi@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): This research is entitled "The Role of the National Unity and Politics in improving the political education for the community to support local governments in maintaining politics in Katingan Regency, Central Kalimantan Province". Problem from This research is public participation about a good political culture still low. The formulation of the problem in this research is how the role of the Unitary Nation and Politics (Bakesbangpol) in improving political education for community to support local government in maintaining political stability in the Katingan Regency, Central Kalimantan Province, what are the inhibiting factors National and Political Unity Agency (Bakesbangpol) in carrying out its duties and function in improving political education for the community to support local government in maintaining political stability in Katingan Regency, Province Central Kalimantan. **Purpose:** The purpose of this study is to analyze and describe the role of the National Unity and Politics Agency in improving political education for the community to support local governments in maintaining political stability in Katingan Regency, Central Kalimantan Province. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research method with an inductive approach. In collecting data, the writer uses observation, interview and documentation techniques. The theory used in this thesis is the role theory proposed by Biddle and Thomas in Sarwono (2015). In this theory there are 4 (four) dimensions, namely, Expectation (hope) Expectations of the role, norms (norms), forms of behavior in the role, assessment and sanctions. **Result:** Based on the results of research on the role of the National and Political Unity Agency in improving political education for the community to support the Regional Government in maintaining political stability in Katingan Regency, Central Kalimantan Province, it has played an optimal role in accordance with applicable laws and regulations. **Conclusion/Sugegestion:** However, in its implementation there are several obstacles faced, such as lack of employee motivation, lack of facilities and infrastructure resources, cultural influences and socio-

cultural values, low public awareness of political culture, there are still people who do not understand the purpose of implementing political education.

Keywords: *Role, Local Government, Political Education*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berjudul “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas politik di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah”. Permasalahan dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat tentang berbudaya politik yang baik masih rendah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas politik di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, apa yang menjadi faktor penghambat Badan kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas politik di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dan mendeskripsikan tentang peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas politik di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori peran yang dikemukakan Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015). Dalam teori ini terdapat 4 (empat) dimensi yaitu, Expectation (harapan) Harapan terhadap peran, norm (norma), bentuk perilaku dalam peran, penilaian dan sanksi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian tentang peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas politik di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sudah berperan secara optimal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. **Kesimpulan dan Saran:** Namun, dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti kurangnya motivasi kerja pegawai, kurangnya sumber daya sarana dan prasarana, pengaruh kebudayaan serta nilai-nilai sosial budaya, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap budaya politik, masih ada masyarakat yang belum memahami tujuan dari pelaksanaan pendidikan politik.

Kata Kunci: *Peran, Pemerintah Daerah, Pendidikan Politik*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan politik merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri yang membawahi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah

Umum yang dilakukan secara terstruktur untuk meningkatkan masyarakat sadar politik serta mampu menjadi pelaku politik itu sendiri (Dirjen Polpum Kemendagri, 2018). Sedangkan pemahaman masyarakat tentang politik itu sendiri masih tergolong rendah terlihat ketika diselenggarakan pemilihan umum masih banyak masyarakat yang hanya memilih pasangan calon kepala daerah ataupun kandidat partai dilihat dari seberapa banyak oknum tersebut memberikan bantuan, baik berupa uang maupun bahan pangan kepada mereka. Ini berarti menunjukkan bahwa partisipasi politik pada masyarakat menggunakan partisipasi politik transaksional dan partisipasi politik praktis (Ismawan, 1999). Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa, yang bertujuan untuk menumbuhkan kapasitas pribadi, menjadi individu yang mandiri dan mengembangkan dimensi sosialnya sesuai dengan status kewarganegaraannya (Handoyo dan Lestari, 2017). Pada dasarnya, pemahaman dalam masyarakat tentang politik hanya sekadar memilih pasangan calon kontestan pemilu saja, tetapi sebenarnya politik mempunyai arti yang luas dan juga banyak maknanya didalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan politik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yaitu masyarakat dituntut untuk lebih memahami tentang hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimana masyarakat juga dituntut untuk dapat berpikir kritis tentang budaya politik yang ada disekitarnya. Dalam kenyataan di lapangan saat ini permasalahan politik di Indonesia mengalami pasang surut. Hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu pada Gubernur Kalimantan Tengah tahun, 2020 di Kabupaten Katingan yang menunjukkan masyarakat terlihat apatis terhadap pelaksanaan pemilu, masyarakat lebih berkeinginan untuk lebih bekerja mencari nafkah dari pada memberikan hak suaranya. Hal ini terlihat dari hasil rekapitulasi KPU Katingan jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih nya sebesar 48,17% (57.103 orang) dari total memilih yaitu 118.545 orang (KPU Kabupaten Katingan, 2020). Melihat permasalahan tersebut perlu adanya tindak lanjut oleh pemerintah dalam menangani rendahnya pemahaman masyarakat terhadap politik dan budaya politik, karena untuk mencapai peningkatan partisipasi masyarakat terhadap politik diperlukan pendidikan dan budaya politik yang lebih kuat. Maka dari itu pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri yang membawahi Direktorat Jenderal Kesatuan Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang membidangi politik dalam negeri yang mempunyai peran yang sangat krusial dalam meningkatkan serta membina pendidikan politik bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat. Dengan memahami politik serta budaya politik maka akan berdampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam artian masyarakat itu sendiri mampu menyelesaikan masalah dengan cara damai serta terbentuknya sifat toleransi akan adanya perbedaan terhadap pandangan politik yang ada dimasyarakat (Dirjen Polpum Kemendagri, 2018). Pengetahuan masyarakat tentang politik tidak terlepas dari tingkat dan jenjang pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkatan pendidikan pada masyarakat maka tingkat pengetahuan dari masyarakat itupun akan semakin tinggi. Faktor yang sangat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang politik adalah tingkat pendidikan pada masyarakat tersebut serta akses informasi yang diterima oleh masyarakat. Semakin masuk ke daerah pelosok Kabupaten Katingan maka akses informasi yang diterimapun akan semakin sulit dikarenakan sulitnya akses jaringan di daerah pelosok Kabupaten Katingan. Lewat pendidikan politik itulah masyarakat diharapkan agar dapat ikut

serta mendukung program pemerintah daerah yaitu menciptakan pemerintah yang bersih, berwibawa, dan inovatif serta mewujudkan supremasi hukum dan juga untuk memperkecil resiko konflik dalam masyarakat dapat diminimalisir. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik yang tercantum pada Pasal 1 ayat 5 yaitu “Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Keberadaan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) merupakan wujud upaya pemerintah daerah dalam melakukan optimalisasi tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat di daerah. Dalam melaksanakan peran Bakesbangpol Kabupaten Katingan yang berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Katingan memiliki peranan yang penting dalam menjaga stabilitas politik di daerah dalam keberlangsungan pembangunan diberbagai sektor.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kurangnya kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparansi dan akuntabel dimana Masih rendahnya akuntabilitas kinerja serta Kurangnya manajemen kinerja pemerintah daerah yang transparansi dan akuntabel. Selain itu masih terdapat Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pemerintah daerah untuk mewujudkan stabilitas politik dan Masih rendahnya pelayanan atas pendidikan politik masyarakat yang masih terdapat Belum meratanya informasi terkait perundanganundangan yang berkaitan dengan parpol.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian pertama yaitu Iko Deswanda, 2018, Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik yang Cerdas dan Berintegritas dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan hasil penelitiannya ialah Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik Yang Cerdas dan Berintegritas Tahun 2018, yaitu sebagai berikut: 1). Peran Pemerintah Selaku Pelopor. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan bergerak masif untuk menjalankan berbagai kegiatan yang sudah direncanakan 2). Peran Pemerintah Selaku Pelaksana Sendiri Peran sebagai pelaksana sendiri adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penelitian yang kedua dari Azfina Julyara, 2015, Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pemberdayaan Nasionalisme Pemuda Kepulauan Riau. Dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif yang hasil penelitiannya berupa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu badan pelaksanaan urusan pemerintah daerah pada bidang pemberdayaan belum melaksanakan fungsinya secara maksimal khususnya pada bidang pembinaan wawasan kebangsaan. Penelitian yang ketiga dari Rahmad Hidayat, 2021, Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Tahun Pada 2018 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan hasil penelitiannya berupa Bakesbangpol Provinsi NTB melakukan koordinasi dengan pihak TNI dan Polri, melakukan kegiatan pemantauan dalam pelaksanaan pilkada serta

penyelesaian masalah dalam pilkada kepada gubernur, menciptakan kondusifitas daerah dalam penyelenggaraan pilkada 2018.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Teori yang digunakan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil penulis. Namun penulis akan mengangkat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politi Bagi Masyarakat Untuk Mendukung Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Stabilitas Politik Di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

II. METODE

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2013), menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fakta tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (berhubungan dengan perilaku, tindakan, dan sebagainya) secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam suatu konteks khusus yang natural dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2013), menyatakan bahwasanya penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud memprediksi fakta yang terjadi dengan melibatkan metode yang ada. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan jika penelitian jenis kualitatif ini merupakan penelitian yang dibuat untuk memperoleh data dengan mengutamakan penelitian dengan mengembangkan hubungan terhadap instrumen-instrumen inti yang nantinya akan diteliti. Metode yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif digunakan untuk lebih mengetahui gejala dan permasalahan tertentu. Menurut Arikunto (2013) bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui keadaan kondisi dan hal lainnya yang disebutkan, yang dimana hasilnya dijelaskan kedalam bentuk laporan penelitian. Sedangkan menurut Nazir (2011), menyatakan bahwa pendekatan induktif adalah cara berpikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pertanyaan yang spesifik dalam menyusun suatu pendapat yang sifatnya umum. Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat disimpulkan jika metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif adalah suatu metode penelitian yang tujuannya menggambarkan keadaan lokasi penelitian yang berangkat berdasarkan fakta empirik yang diperoleh dari keadaan yang diamati pada lokasi penelitian yaitu tentang Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Katingan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Untuk Mendukung Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Stabilitas Politik di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada pengamatan kali ini, penulis menganalisa peran Kesatuan Bangsa dan Politik dengan menggunakan teori Peran yang dikemukakan Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015) yaitu berkaitan:

- a. Individu-individu dalam hubungan sosial
- b. Perilaku yang terjadi dalam hubungan tersebut
- c. Status individu-individu dalam berperilaku
- d. Hubungan individu-individu dalam berperilaku

Yang terdapat empat dimensi terkait tindakan dalam hubungannya terhadap peran adalah sebagai berikut:

1. *Expectation* (harapan)
2. *Norm* (norma)
3. Bentuk perilaku dalam peran
4. Penilaian dan sanksi

Untuk menganalisis masing-masing dimensi tersebut diatas dapat dilihat pada pembahasan berikut ini.

1. **Harapan (*expectation*)**

Salah satu syarat utama bagi keberhasilan peranan sebuah kebijakan adalah harapan (*expectation*). Harapan adalah tindakan yang sudah sesuai dengan semestinya ditunjukkan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan yang mempunyai peranan dalam masyarakat Kabupaten Katingan. Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan terhadap konsep harapan (*expectation*) dalam pelaksanaan tugas sudah berjalan dengan baik, tetapi perlu pendekatan yang lebih oleh Badan Kesbangpol kepada masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan dapat lebih efektif. Selain itu perlu dukungan dari masyarakat Kabupaten Katingan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan partisipasi politik melalui pendidikan politik. Dalam pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan melalui pihak Badan Kesbangpol melakukan pendidikan politik dinilai masih banyak masyarakat yang masih kurang peduli akan kehidupan berpolitik.

2. **Norma**

Aspek lain yang mempengaruhi keberhasilan peran sebuah kebijakan adalah konsep norma guna pendorong pelaksana kegiatan suatu organisasi tersebut. Para pembuat kebijakan tersebut harus mengetahui secara jelas tentang aturan yang harus diinformasikan dan dilakukannya. Hal tersebut sangat diperlukan guna memahami peran dalam pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sebagaimana mestinya serta tidak terjadi kesalahpahaman terhadap kebijakan tersebut. Dan juga, perlu melihat kondisi lingkungan dan budaya yang ada di daerah sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut dapat secara optimal berjalan. Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik di

Kabupaten Katingan sudah sesuai dengan peraturan perundangan berlaku.

3. Wujud Perilaku

Peran yang diwujudkan oleh aktor, adalah untuk melihat sifat-sifat tertentu supaya orang lain dapat mengerti secara jelas peran dari aktor. Maka dari itu, Badan Kesbangpol adalah lembaga pemerintah Kabupaten Katingan yang berperan sebagai perantara antara pemerintah dengan masyarakat dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Kabupaten Katingan. Peran Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan yaitu sebagai penyelenggara pendidikan politik serta melakukan monitoring terhadap budaya politik yang berkembang dimasyarakat bersama dengan partai politik yang ada di Kabupaten Katingan.

4. Bina Kelembagaan

Penilaian dan sanksi memang susah untuk dilepaskan jika dihubungkan terhadap peran. Dikarenakan penilaian itu berdasarkan terhadap keinginan masyarakat atas norma. Sesuai dengan norma itu, masyarakat mempresentasikan pengaruh positif ataupun negatif tentang sifat. Pengaruh negatif dan positif tersebutlah yang disebut dengan peran, seperti itupun dengan peran yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan kepada masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan sanksi merupakan upaya orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau supaya pelaksanaan peran diubah sedemikian rupa supaya hal yang sebelumnya negatif menjadi positif. Dampak serta hasil positif dengan adanya pelaksanaan pendidikan politik oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan tentunya memberikan dampak positif di kehidupan masyarakat Kabupaten Katingan kedepan nya yang tentunya meningkatkan pengetahuan masyarakat itu sendiri tentang budaya politik yang baik. Begitu pula dengan sanksi terhadap adanya oknum yang melakukan politik transaksional dan politik uang yang akan ditangani oleh pihak yang berwajib.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan.

1. Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang turut mendukung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan Pendidikan Politik kepada Masyarakat di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam yang mempengaruhi kinerja dari setiap pelaksanaan kegiatan. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan peran Badan Kesbangpol dalam pelaksanaan pendidikan politik diantaranya:

1. Pegawai Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Selatan tertib dalam menjalankan kegiatan rutin seperti apel pagi.
2. Dari segi pendidikan pegawai Badan Kesbangpol cukup baik, hal tersebut karena sebagian besar pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Selatan

adalah sarjana.

3. Koordinasi Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Selatan dengan Pemerintah Daerah cukup baik.
4. Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan antara pegawai Badan Kesbangpol dengan partai politik yang ada di Kabupaten Katingan serta masyarakat sebagai pendukung dalam pelaksanaan pendidikan politik cukup baik, karena tanpa adanya kerja sama dari partai politik dan masyarakat, pelaksanaan pendidikan politik tidak akan berjalan sesuai dengan harapan pemerintah.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan solusi, berikut adalah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi peran Badan Kesbangpol dalam pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat.

1. Sosial dan budaya masyarakat di daerah Kabupaten Katingan cukup mendukung dalam pelaksanaan pendidikan politik, dalam pelaksanaannya masyarakat turut ikut mengambil peran yang aktif dalam kegiatan maupun tujuan dari pendidikan politik itu sendiri.
2. Partisipasi masyarakat cukup baik untuk mendukung pelaksanaan pendidikan politik, karena tanpa adanya masyarakat, peran Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Selatan tidak akan berjalan dengan baik.

2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat, antara lain:

a. Faktor Internal

1. Peran aktif dari struktur birokrasi aparat Badan Kesbangpol di Kabupaten Katingan dirasa masih kurang. Tanpa adanya peran aktif maka proses penertiban organisasi masyarakat ini tidak akan berjalan dengan baik.
2. Kurangnya motivasi kerja terhadap pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan sehingga sering tidak masuk pada jam kerja siang.
3. Kurangnya koordinasi yang dilakukan kepada sesama pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan dalam memberikan informasi kerja.
4. Kurangnya sumber daya sarana dan prasarana yang ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan.
5. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Badan Kesbangpol dalam membina, mengarahkan dan membantu tujuan pendidikan politik.

b. Faktor Eksternal

1. Lingkungan Alam fisik, salah satu faktor pelaksanaan pendidikan politik berjalan kurang lancar bisa bersumber dari lingkungan alam seperti terjadinya bencana alam banjir dan sebagainya.
2. Pengaruh kebudayaan akan menimbulkan suatu nilai-nilai sosial budaya yang

saling mempengaruhi antar suku bahasa, sifat, dan moral seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

3. Kesadaran masyarakat dalam mengetahui wawasan tentang budaya politik yang baik dan benar.
4. Sosialisasi yang dilakukan Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan terhadap pendidikan politik sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun masyarakat yang ada di Kabupaten Katingan belum memahami tujuan dari sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan

3.3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Melaksanakan Peningkatan Pendidikan Politik dan Partisipasi Politik Bagi Masyarakat di Kabupaten Katingan.

1. Upaya Langsung

Upaya adalah cara mengatasi sesuatu permasalahan atau proses suatu cara yang digunakan seseorang dalam mencari solusi disetiap permasalahan. Dalam mengatasi suatu masalah, upaya dapat dibagi menjadi dua, antara lain:

a. Upaya Internal

- 1) Melakukan pembinaan terhadap seluruh pegawai kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan, partai politik, serta masyarakat itu sendiri
- 2) Dalam memberikan motivasi semangat kerja, melalui Kepala Badan Kesbangpol harus memberikan reward atau penghargaan lebih terhadap pegawai-pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Selatan. Oleh sebab itu Kepala Badan Kesbangpol dituntut harus mampu berperan aktif dalam mengawasi, membina dan mengarahkan para pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Selatan agar lebih bisa dalam membangkitkan semangat kerja aparatur birokrasinya.
- 3) Koordinasi merupakan usaha mencegah terjadinya kekacauan, kekosongan pekerjaan agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan arahan dan pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan. Dalam hal ini Kepala Badan Kesbangpol melakukan pembagian kerja yang jelas agar semua pekerjaan terbagi habis, meningkatkan semangat kerjasama antar pegawai kantor dan menyiapkan fasilitas komunikasi yang memadai. Melakukan rapat koordinasi memang penting diadakan setiap bulan guna menciptakan disiplin pegawai.
- 4) Kepala Badan Kesbangpol telah melakukan perbaikan, pengadaan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada.

b. Upaya Eksternal

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat, partisipasi merupakan hak dan kewajiban masyarakat untuk memberikan dukungan kepada pencapaian suatu keputusan, sehingga masyarakat dapat memberikan kesempatan untuk ikut serta dalam mendukung pencapaian suatu peran dari Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan tidak akan bisa berjalan dengan maksimal, dan selama

pelaksanaan penelitian di Badan Kesbangpol Katingan penulis berpendapat bahwa partisipasi masyarakat yang dilakukan masyarakat terhadap peran Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan sudah berjalan secara menyeluruh.

- 2) Berperan aktif dalam pelaksanaan pendidikan politik, dengan demikian peran serta rasa keterlibatan aktif pegawai maupun masyarakat dapat dirasakan sehingga menimbulkan adanya rasa dibutuhkan oleh lembaga terkait.

2. Upaya Tidak Langsung

a. Upaya Internal

- 1) Memberikan sosialisasi secara tidak menyeluruh, tidak diketahui oleh seluruh pegawai kantor, partai politik dan masyarakat sehingga pelaksanaan penertiban organisasi masyarakat tidak bisa terlaksana secara menyeluruh.
- 2) Mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.4/435/KESBANG, walaupun peraturan tersebut belum dapat terlaksana dengan tertib diakibatkan kurangnya konsistensi pegawai kantor dalam menjalankan tujuan dari peraturan tersebut.

b. Upaya Eksternal

- 1) Melakukan pembuatan papan pengumuman terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kesbangpol Katingan.
- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan politik. Tujuannya adalah agar masyarakat yang ada di Kabupaten Katingan dapat memahami arti dan tujuan pendidikan politik tersebut, karena di Kabupaten Katingan sendiri masih banyak masyarakat yang kurang peduli tentang budaya berpolitik yang baik.
- 3) Melakukan penyaringan terhadap masuknya budaya asing, tujuannya adalah agar kultur sosial budaya masyarakat tidak luntur sehingga dapat menimbulkan perubahan budaya yang cepat dan dapat mempengaruhi peran serta kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada saat melakukan penelitian bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan dalam meningkatkan perannya seperti yang disebutkan di atas masih belum optimal, hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol Katingan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam pelaksanaan Pendidikan Politik yang dilakukan Bakesbangpol Kabupaten Katingan sudah berjalan dengan aturan dan petunjuk yang ada sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan

Tengah, hal ini untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol itu sendiri baik itu dalam penyelenggaraan kebijakan, penyusunan rancangan kerja, penyusunan bahan perumusan kebijakan, penyelenggaraan koordinasi, dan penyelenggaraan monitoring pada bidang pendidikan politik. Dan kita dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan politik juga berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 26 Tahun 2016. Hal ini bertujuan supaya dalam penyelenggaraan kegiatan memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga dalam pelaksanaannya bisa sesuai norma dan peraturan yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian terdahulu, penulis dapat menguraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas politik di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

Peran Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan dalam meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini. Badan Kesbangpol sendiri berperan sebagai fasilitator pemerintah daerah Kabupaten Katingan dalam penyelenggaraan pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya pada bidang pendidikan politik. Pelaksanaan kegiatan itu berupa penyusunan rancangan kerja, penyusunan bahan perumusan kebijakan, penyelenggaraan kebijakan, penyelenggaraan koordinasi, penyelenggaraan monitoring pada bidang politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum atau pemilihan umum kepala daerah. Badan Kesbangpol dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik dilakukan untuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Katingan guna menjaga stabilitas politik dengan bekerja sama dengan partai politik yang ada di Kabupaten Katingan

2. Faktor penghambat Badan kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas politik di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah

Yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan:

a. Faktor Internal

- 1) Peran aktif dari struktur birokrasi aparat Badan Kesbangpol di Kabupaten Katingan dirasa masih kurang. Tanpa adanya peran aktif maka proses penertiban organisasi masyarakat ini tidak akan berjalan dengan baik.
- 2) Kurangnya motivasi kerja terhadap pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan sehingga sering tidak masuk pada jam kerja siang.
- 3) Kurangnya koordinasi yang dilakukan kepada sesama pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan dalam memberikan informasi kerja.
- 4) Kurangnya sumber daya sarana dan prasarana yang ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan.

- 5) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Badan Kesbangpol dalam membina, mengarahkan dan membantu tujuan pendidikan politik.

b. Faktor Eksternal

- 1) Lingkungan Alam fisik, salah satu faktor pelaksanaan pendidikan politik berjalan kurang lancar bisa bersumber dari lingkungan alam seperti terjadinya bencana alam banjir dan sebagainya.
- 2) Pengaruh kebudayaan akan menimbulkan suatu nilai-nilai sosial budaya yang saling mempengaruhi antar suku bahasa, sifat, dan moral seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
- 3) Kesadaran masyarakat dalam mengetahui wawasan tentang budaya politik yang baik dan benar.
- 4) Sosialisasi yang dilakukan Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan terhadap pendidikan politik sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun masyarakat yang ada di Kabupaten Katingan belum memahami tujuan dari sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan refrensi Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Untuk Mendukung Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Stabilitas Politik Di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

Arah Masa Depan Penelitian: (future work): Peneliti menyadari masih awalnya temuan pada pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Untuk Mendukung Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Stabilitas Politik Di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Affandi, Idrus. 2021. *Pendidikan Politik Kepemimpinan dan Kepeloporan*. BANDUNG: PT Remaja Rosdakarya.

Almond, Gabriel A. 1960. *The Politics of the Developing Areas*. Princeton:Princeton University Press.

Eko Handoyo, dan Puji Lestari. 2017. *Pendidikan Politik*. Yogyakarta:Penerbit Pohon Cahaya.

Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo. Ismawan, Indra. 1999. *Money politics : pengaruh uang dalam pemilu*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Kartasapoetra, Misdyanti dan. 1993. *Fungsi Pemerintahan Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nazir, Moh. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nur Indrianto,dan Bambang Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Nur Khoiran, M. 1999. *Pendidikan Politik bagi warga negara*. Yogyakarta:LKIS.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah tentang penyelenggaraan pendidikan politik

Peraturan Bupati Katingan Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan tentang pelaksanaan pendidikan dan pembinaan politik